

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN SAMPAH
DI PASAR TATAAN KABUPATEN PESAWARAN**

Akhmad Suharyo dan Esha Erlangga

ABSTRACT

This study mainly wants to know and clarify matters concerning the implementation of policies in increasing the effectiveness of waste management in the Tataan Market, Pesawaran Regency. The purpose of this research is to obtain explanatory knowledge to identify and analyze the implementation of policies in increasing the effectiveness of waste management in the Tataan Market, Pesawaran Regency.

The research method used in this research is using qualitative research with descriptive analysis method. The use of this method is to examine and describe qualitatively, how to implement policies in increasing the effectiveness of waste management in the Pesawaran District Management Market.

The results showed that the implementation of policies in increasing the effectiveness of waste management at the Tataan Market, Pesawaran Regency, was not optimal because according to the results of the study that the facilities (vehicles, carts, TPS) used were minimal and then there was no Landfills available in the long or medium term. This is in accordance with the results of the study showing that from the dimensions used, namely communication, disposition, quality of resources, and bureaucratic structure, all of these dimensions are still not optimally implemented.

Keywords: Implementation, policy, Garbage

A. PENDAHULUAN

Penanganan masalah sampah harus terus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan yang bersifat komprehensif, sehingga memerlukan penanganan yang serius agar pesan-pesan seperti “kebersihan pangkal kesehatan” yang berkesan menambah parah wajah kota yang sudah dihiasi tumpukan sampah yang menyebar bau busuk dan pada gilirannya akan menebar penyakit bagi warga kota. Sampah akan menumpuk dengan cepat bila tidak dikelola dengan baik, akibatnya lingkungan kota akan tercemar sehingga kualitas dan daya dukung lingkungan merosot.

Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pesawaran adalah instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran, bertujuan mengembangkan visi dan misi sebagai pelayan masyarakat dalam bidang kebersihan kota. Menjadikan Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup (BPLH) sebagai Instansi yang dapat mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Pesawaran, merupakan visi yang akan dicapai dengan misi yaitu menyelenggarakan usaha-usaha untuk menciptakan Kabupaten Pesawaran yang bersih, sehat, tertib dan indah. Visi dan misi ini dikembangkan

dalam rangka usaha membentuk citra positif bagi Kabupaten Pesawaran sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung.

Lingkungan yang bersih akan melahirkan kehidupan yang nyaman dan kegairahan hidup sehat, serta kesan positif bagi wisatawan dalam dan luar negeri terhadap suasana wilayah Kabupaten Pesawaran. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup (BPLH) senantiasa berusaha meningkatkan penanganan persampahan dengan menerapkan formula tertentu dengan tujuan agar masyarakat merasa puas dengan penanganan persampahan yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu kenyamanan dari kebersihan sampah utamanya pada lokasi-lokasi tertentu seperti pada lokasi daerah sekitar pasar dan tempat-tempat umum lainnya, yang juga merupakan suatu cerminan dari keindahan dari kebersihan kota tersebut.

Dalam penanganan sampah di Kabupaten Pesawaran ternyata tidak semudah yang dibayangkan, Banyak ditemukan masalah mulai ditingkat sumber produksi sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah, sampai pada pengelolaan dan pemusnahan sampah, sehingga kebijakan ini dikatakan belum di implementasikan dengan baik.

Secara empirik bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Volume sampah yang terus bertambah, tidak diikuti oleh Tempat Pembuangan Sementara (TPS), demikian juga dengan sarana pengangkut, bahkan kendaraan yang ada sudah sebagian tidak layak jalan.
2. Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pesawaran, yang melaksanakan kebijakan relatif belum optimal, sebab belum ada himbauan ataupun sosialisasi langsung kepada masyarakat dari pihak pemerintah dalam hal penanggulangan sampah, dipasar Tataan.
3. Peran masyarakat akan kebersihan belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini terlihat dari kesadaran sebagian masyarakat yang belum menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya relatif rendah, dan sampah masih bertaburan dimana-mana.
4. Kurangnya kendaraan pengangkut sampah, sehingga sampah yang ada di Pasar Tataan hanya diangkut sekali dalam sehari, dari tempat pembuangan sementara (TPS) ketempat pembuangan akhir (TPA), sehingga banyak sampah yang tidak terangkut, sedangkan volume produksi sampah lebih besar dari volume daya angkutnya.
5. Relatif kurangnya petugas pembersih sampah sehingga, kewalahan dalam memberisihkan sampah di pasar tataan mengakibatkan ketidak nyamanan warga.

Dari berbagai permasalahan tersebut, penulis akan mencoba menganalisis dilihat dari sudut implementasi kebijakan sampai sejauh mana program-program tersebut dalam pengkontribusiannya terhadap efektivitas penanggulangan sampah, yaitu dengan mengadakan penelitian dan akan menuangkannya dalam bentuk Tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Sampah Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran”

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dikemukakan masalah pokoknya ingin membahas tentang Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Sampah Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, Dari permasalahan utama tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan masalah (*problem Question*) yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Sampah Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Aspek-aspek apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Sampah Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran.
3. Apa saja yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Sampah Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan lingkungan yang dijadikan dimensi adalah didasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Edwards III, (2008:9-10) yaitu:

1. Komunikasi, komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan serta merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun secara horizontal, yang hal ini merupakan modal yang sangat menentukan berhasil tidaknya pencapaian Efektivitas Penanggulangan Sampah Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Sumber Daya, Ketersediaan dan kelayakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber yang dibutuhkan tidak cukup memadai. Sumber-sumber yang dimaksud menurut George C. Edwards III (1980:30) adalah : (a) staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan, (b) informasi

yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi dan (c) adanya dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi dan (d) adanya wewenang yang dimiliki implementator untuk melaksanakan kebijakan, (e) fasilitas-fasilitas lain.

3. Disposisi. diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratik. Apa bila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Organisasi, Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Organisasi karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dan tergantung pada komunikasi anggotanya untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi itu. Struktur organisasi dapat dinilai sebagai faktor penting dalam berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan. Kemudian dalam penelitian efektivitas organisasi terus bertambah, namun hanya terdapat sedikit konsensus tentang bagaimana mengkonseptualisasikan, mengukur, dan menjelaskan efektivitas organisasi. Menurut Ravianto (2009:60) untuk mengukur efektivitas, maka dimensi yang dipergunakan adalah (1) Satuan Waktu; (2) Satuan Hasil; dan (3) Kualitas kerja.

Maksudnya proses implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan secara efektif yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Untuk itu, efektivitas organisasi dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan kebijaksanaan organisasi. Efektivitas organisasi juga dapat dilihat sejauhmana organisasi dapat melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.

Efektivitas organisasi tidak hanya dilihat dari segi pencapaian tujuan, tetapi juga dari segi kepentingan anggota organisasi secara individu. Efektivitas organisasi bila dilihat dari sudut pandang karyawan yaitu sampai seberapa jauh karyawan merasakan manfaat organisasi

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, namun efektivitas organisasi bila dikaji dari perspektif moril dan kohesi anggota organisasi tersebut, misalnya dari semangat kerja pegawai dan kekompakan mereka dalam organisasi. Kohesi atau kekompakan kelompok dalam organisasi mempunyai efek yang positif terhadap organisasi, kecuali kalau kohesi menjurus ke arah gejala *groupthink*, yaitu keengganan anggota organisasi untuk berbeda pendapat dengan pendapat yang dominan dalam kelompoknya.

Kebijakan kebersihan lingkungan dalam hal pengelolaan sampah merupakan salah satu tugas pemerintah khususnya pemerintah daerah, pada awalnya tugas ini diemban oleh Departemen Pekerjaan Umum khususnya Cipta Karya kemudian ditempatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016. Hal tersebut merupakan perwujudan dari salah satu tugas yang dilimpahkan ke pemerintah daerah Kabupaten melalui otonomi daerah, oleh karena tugas tersebut telah dilimpahkan ke daerah Kabupaten maka Kabupaten dengan otonominya tersebut dapat menentukan strategi dan berhak untuk membentuk kelembagaan yang akan menangani masalah sampah serta hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan kebersihan lingkungan.

Kegiatan yang berkenaan dengan kebersihan semakin meningkatnya volume dan jenisnya, termasuk infrastruktur lengkap dengan sarana dan prasarana, oleh karena membutuhkan biaya dan personal yang sangat besar maka munculah gagasan penyederhanaan birokrasi, dimaksudkan agar dapat dilakukan pengelolaan kebersihan yang berdaya guna dan berhasil guna, tidak terlepas dari indikator-indikator tentang efektivitas pengelolaan sampah yang optimal.

C. METODOLOGI

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penggunaan metode ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara kualitatif, bagaimana Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Sampah Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran. Seluruh data diperoleh langsung dari informan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan sketsa pembahasan tersebut yang mengambil kajian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan sampah pada Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, bahwa

Implementasi Kebijakan Kebersihan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Sampah Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, telah dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pengelolaan sampah pada Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, maka berdasarkan hasil penelitian analisis kualitatif tersebut, peneliti dapat menjelaskan hasil dari penelitian berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III yaitu:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan (*message*) dari komunikator (penyampai) pesan kebijakan dari pusat kepada Provinsi, dan Kabupaten atau Kota, dilakukan dalam bentuk Peraturan Bupati Pesawaran No. 4 tahun 2016 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban, pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan sampah pada Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, disampaikan melalui dua cara yaitu tertulis (penyampaian petunjuk teknis) dan lisan (rapat pengarahan, dialog). Baik bagi pegawai yang mengawasi pengelolaan sampah maupun pegawai pengelola sampah, tidaklah sulit karena tidak ada pekerjaan yang sifatnya sangat teknis karena menjadi tugas mereka sehari-hari.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, maka peran komunikasi menunjukkan bahwa semakin banyak aktivitas organisasi, maka semakin banyak pula informasi yang harus disalurkan pada unit-unit organisasi, berjalan tidaknya suatu proses administrasi dapat dilihat dari lancar tidak arus informasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada para bawahan, atau karyawan dengan karyawan yang lain. Komunikasi dalam organisasi dapat efektif apabila organisasi tersebut dapat meminimalkan faktor pengganggu atau “*noise*” sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Sesuai hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Sampah Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, dalam pelaksanaan kebijakan sesuai faktor komunikasi, bahwa pegawai pada umumnya telah mensosialisasikan peraturan tersebut, dan pada umumnya masyarakat telah sadar dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, walaupun masih ada sampah yang sering terdapat pada bukan tempatnya, namun secara umum pegawai sudah membersihkan sampah setiap hari dengan baik.

2. Faktor Sumber Daya

Untuk meningkatkan kemampuan pegawai, maka pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan sampah di Pasar Tataan, selalu memberikan motivasi dan tidak henti-hentinya

mengawasi pelaksanaan kebersihan, pegawai pengelola sampah juga sering dikumpulkan untuk didakan pertembuan terkait dengan bidang tugasnya masing-masing, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas organisasi.

Dari hasil penelitian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, menunjukkan bahwa penanggulangan sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat sebagai salah satu produk sampah sehingga peran serta masyarakat di dalam usaha penganggulangan kebersihan perlu lebih ditingkatkan lagi karena walaupun kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh tapi belum cukup tinggi untuk dapat melahirkan tindakan yang nyata dalam usaha swadaya perbaikan lingkungan hidup.

Menurut penulis bahwa pendidikan dan pelatihan kepada pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, sangat penting dilaksanakan untuk membekali pegawai atau pegawai dengan kemampuan dan keterampilan serta perilaku agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan demikian dapat menumbuhkan perasaan untuk mencintai terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

3. Faktor Disposisi/ Sikap

Sikap implementor/disposisi pada dasarnya menyangkut pemahaman program, kewenangan, kesempatan berkembang, dan komitmen para pegawai untuk melaksanakan suatu kebijakan. Atas dasar tersebut terdapat tiga kemungkinan sikap implementor yaitu: *pertama*, melaksanakan program kebijakan; *kedua*, menolak program kebijakan (terang-terangan atau tersembunyi); dan *ketiga* bersikap netral, dalam arti ikut mengerjakan jika program itu memberi manfaat.

Menyangkut tentang sikap petugas pengelola sampah di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran pada umumnya sudah melaksanakan pembersihan sampah setiap harinya, dan mereka sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka sebab kalau terjadi penumpukan sampah, maka petugas yang ada pada lokasi tersebut pasti diberikan teguran atas kebersihan tersebut, sehingga petugas pada umumnya tumbuh atas kesadaran pribadi untuk membersihkan sampah pada lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai hasil penelitian bahwa disposisi atau sikap pegawai dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, pada umumnya sudah melaksanakan kebersihan sesuai dengan tugas pokok mereka, dan pegawai telah bersikap dengan baik dan sopan, walaupun masih ada yang sering terlambat dalam melaksanakan kebersihan, namun hal tersebut pegawai tetap membersihkan dengan baik.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan lingkungan di di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan sampah, aspek Struktur Birokrasi, mempunyai dampak terhadap penerapan sebuah kebijakan, dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut. Dalam hal ini ada dua karakteristik birokrasi yang umum, yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta fragmentasi dalam pertanggungjawaban di antara berbagai unit organisasi. Walaupun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pegawai mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih dapat terhambat oleh inefisiensi struktur birokratis, sehingga kebijakan menjadi tidak efisien.

Dengan struktur birokrasi tersebut maka merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan tujuan program adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi kelembagaan pegawai, lingkungan dan faktor internal seperti pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan sikap pegawai.

E. KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Sampah Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, Belum optimal karena sesuai hasil penelitian bahwa fasilitas (Kendaraan, gerobak, TPS) yang dipergunakan sangat minim kemudian TPA juga belum ada yang tersedia dalam jangka panjang atau menengah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dimensi-dimensi yang dipergunakan yaitu komunikasi, disposisi, kualitas sumber daya, serta struktur birokrasi, semua dimensi tersebut masih belum optimal pelaksanaannya.
2. Aspek-aspek yang menghambat yaitu (1) Sumber daya manusia, memerlukan kuantitas yang relatif banyak untuk mengelola kebersihan yang selama ini jumlah pegawai yang bertugas untuk mengelola pengelolaan sampah Di Pasar Tataan Kabupaten Pesawaran, relatif sedikit sehingga tidak dapat mengelola dengan baik dan menjangkau perumahan sehingga sering terjadi menumpukan sampah, hal ini karena luas wilayah yang relative luas kemudian masih adanya fasilitas yang relative terbatas dalam pengelolaan sampah. (2) Kurangnya Tempat pembuangan sampah sementara, (TPS), sehingga sampah nampak

berserakah bukan pada tempat yang telah disediakan kemudian, tempat pembuangan sementara (TPS) yang disiapkan tidak mencukupi untuk penampungan sementara karena, lokasi tersebut relatif terbatas. (3) Relatif kurangnya kendaraan pengangkut sampah, baik dari perumahan menuju ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), maupun kendaraan pengangkut sampah yang berasal dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

DAFTAR PUSTAKA

- Admosoedarmo, Slamet. 2012. *Studi Public Administration*. Jakarta : Aksara Baru
- Dunn, William, N. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Alih Bahasa: Edisi Kedua, Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward. George III, C. 2008. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Jones, Charles O. 2004. Terjemahan Ricky Istanto, *Public Policy*, Cetakan ke-III, Jakarta : PT. Raja Grafindo,
- Islamy, M. Irfan, 2014. *“Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara”* Jakarta Bumi Aksara.
- Ravianto. 2009. *Produktivitas dan Tenaga kerja Indonesia*, Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2005., *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung : Ilham Jaya.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Gramedia.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2016, Tentang *Kebersihan Keindahan dan Ketertiban*, Bagian Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi*.
- Mahyudin, *Journal Teknik Lingkungan*, Vol. 3, No. 1, 2017, *Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)*.
- Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology*, Okayama University, 12 (I): 41-49.
- Surahma Asti Mulasari, KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Analisis situasi permasalahan sampah kota Yogyakarta dan kebijakan penanggulangannya, 2016/1/24.